



# BPKP Temukan Kerugian Negara

■ Dugaan Mark Up Pembangunan Fisik di Desa Satra

■ 30 Orang Diperiksa Kejari Sebagai Saksi

**SEMARAPURA, TRIBUN BALI** - Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Klungkung, Meyer V Simanjuntak membaca berkas tebal di atas meja kerjanya, Senin (26/2). Ia tampak serius



mengamati berkas yang merupakan berita acara pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus yang sedang dialami oleh pihak Kejari Klungkung.

Setelah menunggu beberapa bulan, Kejari Klungkung akhirnya menerima surat balasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasilnya, ditemukan unsur kerugian negara terhadap beberapa kegiatan realisasi APBDes di Desa Satra, Kecamatan Klungkung tahun 2015.

"Kami terus dalam kasus ini dengan meminta keterangan saksi-saksi, termasuk aparat desa dan perbekel sebagai saksi. Termasuk beberapa kali melakukan pengecekan

ke lapangan," kata Meyer V Simanjuntak, Senin (26/2).

Sejak kasus bergulir, Kejari telah memeriksa 30 saksi untuk mendukung pembuktian dugaan penyelewengan realisasi APBDes Satra tahun 2015. Hasil audit dari BPKP turun akhir tahun 2017, dan ditemukan unsur kerugian negara.

"Kebetulan hasil BPKP turun akhir tahun 2017 dan kasusnya dilanjutkan tahun 2018 ini karena memang ditemukan adanya unsur kerugian negara. Tapi belum saya bisa sampaikan sekarang berapa unsur kerugian negara dari kasus itu karena kita belum tetapkan tersangka," jelas Meyer.

Ia tidak menampik ihwal kemungkinan ada lebih dari satu tersangka dalam perkara tersebut. Meyer membeberkan, dugaan kerugian negara dalam kasus tersebut diawali dari te-

TRIBUN BALI/ EKA MITA SUPUTRA

**BACA BERKAS** - Kasi Pidsus Kejari Klungkung, Meyer V Simanjuntak membaca berkas saat ditemui di ruangannya, Senin (26/2).

Edisi : Selasa, 27 Februari 2018

Hal : 4



Sambungan ---

muan kejaksaan karena adanya dugaan mark up atau pengelembungan anggaran terhadap beberapa kegiatan pembangunan fisik realisasi APBDes Satra.

"Ada dugaan mark up di beberapa kegiatan, salah satunya pembangunan balai desa. Ada puluhan kegiatan realisasi di tahun 2015 di desa setempat yang kami teliti. Rincinya belum bisa kami sampaikan, karena proses penyidikan masih berlanjut. Tapi kami tinggal cari siapa-siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini," kata Mayer.

Sementara itu, Perbekel Desa Satra, Ni Made Ratnadi mengatakan, permasalahan tersebut sudah selesai di tahun 2017. "Intinya, dana yang diperuntukan untuk desa itu dipergunakan sesuai aturan yang berlaku. Tidak bisa dinilai masyarakat, karena masyarakat kan belum tentu tahu aturan," ujarnya.

Dugaan kasus penyelewengan realisasi APBDes Satra bermula dari surat kaleng yang diterima Kejari Klungkung tahun 2016. Surat tersebut menyoroti kinerja Perbekel Desa Satra, Ni Made Ratnadi yang dinilai kurang transparan dalam mengelola keuangan desa tahun 2015. Ratnadi membantah seluruh tuduhan yang tercantum di surat kaleng tersebut. (mit)



### Story Highlight



#### Januari 2016

- ◆ Kejari Klungkung menerima surat Kaleng
- ◆ Isinya menyoroti kinerja Perbekel Desa Satra, Ni Made Ratnadi

- ◆ Kejari melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti dan keterangan saksi



#### Juni 2017

- ◆ Kejari Klungkung berkoordinasi dengan BPKP mencari unsur kerugian negara



#### Akhir 2017

- ◆ BPKP menyatakan ada unsur kerugian negara
- ◆ Diduga terjadi markup dalam beberapa kegiatan pembangunan fisik.



INFOGRAFIS: TRIBUN BALI/PRIMA

## Minta Pertimbangan Ahli Hukum Pidana

**GUNA** mendalami kasus ini, Kejari Klungkung berkoordinasi dengan ahli pidana dari Universitas Udayana. Hal ini untuk melengkapi alat bukti sebelum Kejari menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. "Kami sudah bersurat ke Unud, dan menunggu balasannya. Kami berkoordinasi dengan ahli pidana dari Unud untuk melengkapi alat bukti," kata Meyer.

Ia pun tidak menampik, pengelolaan APBDes saat itu rentan dengan penyelewengan karena sistemnya masih manual. Setelah tahun 2017, dibuatlah sistem keuangan desa oleh kementerian sehingga lebih ketat sebagai bentuk antisipasi penyelewengan anggaran desa. "Saat ini sistemnya sudah elektronik untuk mengantisipasi penyelewengan penggunaan anggaran," jelasnya. (mit)

Edisi : Selasa, 27 Februari 2018

Hal : 4